

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Farried. Alam, Andi Syamsu. Wantu, Sastro M. (2012). Studi Analisa Kebijakan Konsep, Teori dan Aplikasi Sampel Teknik Analisa Kebijakan Pemerintah. (Bandung: PT Refika Aditama.
- Alamsyah, Kamal. (2016). Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi. Bandung: Media Citra Mandiri Press.
- Agustino, Leo. (2020) Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV Alfabeta.
- Budiardjo, Miriam. (2007) Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. (2003) Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Dunn, Wiliam N. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. Wibawa, Samodra. Asitadani, Diah. Hadna, Agus Heruanto. Purwanto, Erwan Agus Purwanto.
- Kadji, Yulianto. (2015). Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas. Gorontalo: UNG Press.
- Suharno. (2013). Dasar-Dasar Kebijakan Publik Proses dan Analisis Kebijakan. (Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Sugiyono. (2017) Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif, Dan R&D. Bandung: CV Alfabeta.
- Tahir, Arifin. (2014). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung: PT Alfabeta.
- Winarno, Budi. (2016). Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: PT Buku Seru.

Widodo, Joko. (2010) *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media

### **Jurnal/Skripsi**

Nurhadi, Wirayudha (2019). Evaluasi Kebijakan Peantaaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Tasikmalaya Tahun 2016-2017 (Studi Kasus: Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima pada Sebagian Ruas Jalan Cihideung Kota Tasikmalaya).

Setyawan, Dody. Srihardjono, Nanang Bagus (2016). *Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Desa Dengan Model Edward III Di Desa Landungsari Kabupaten Malang*, Jurnal Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang.

Bimantara, Renandya Yoga. Suryaningsih Margaretha (2019). *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*. Jurnal Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

Priyanto, Hary. Noviana, Nana. (2018). *Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2015*. Jurnal Analisis Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik..

Deni Sudrajat (2020). Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Jalan Cihideung Kota Tasikmalaya),

**Sumber Internet:**

SejarahKotaTasikmalaya,[https://portal.tasikmalayakota.go.id/index.php/q/sekilas\\_sejarah](https://portal.tasikmalayakota.go.id/index.php/q/sekilas_sejarah), Diakses tanggal 16 November 2020

Dede Hadiyana, “Nanang Nurjamil : Penataan PKL Cihideung Kota Tasikmalaya Semrawut,” <https://news.koropak.co.id/12798/nanang-nurjamil-penataan-pkl-Cihideung-kota-tasikmalaya-semrawut> (akses 26 Febuari 2021)

**Perundang-Undangan:**

Peraturan Daerah Nomor: 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum

Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Sebagian Ruas Jalan Cihideung

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **PERATURAN WALIKOTA NOMOR 60 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI SEBAGIAN RUAS JALAN CIHIDEUNG**

1. Apakah kebijakan ini telah dikomunikasikan kepada para pelaksana dan sasaran kebijakan?
2. Bagaimana transmisi dalam pelaksanaan kebijakan ini ?
3. Apakah kebijakan yang telah ditransmisikan sudah jelas untuk para pelaksana dan sasaran kebijakan?
4. Bagaimana konsistensi perintah-perintah dalam pelaksanaan kebijakan ini?
5. Apakah sumberdaya staf sudah mencukupi?
6. Apakah ada informasi tentang bagaimana pelaksanaan kebijakan ini?
7. Bagaimana terkait dengan kewenangan yang dibutuhkan oleh pelaksana?
8. Apakah ada pemberian fasilitas untuk para pelaksana dan pedagang?
9. Bagaimana komitmen para pelaksana kebijakan?
10. Bagaimana sikap dinas dalam menjalankan Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Pada Sebagian Ruas Jalan Cihideung?
11. Apakah ada Standar Operating Procedure (SOP) dalam pelaksanaan kebijakan ini?
12. Bagaimana fragmentasi yang ada dalam pelaksanaan kebijakan?
13. Apakah kebijakan ini sudah disosialisasikan kepada bapak/ibu?
14. Apakah bapak/ibu sudah mengetahui dengan jelas peraturan ini?
15. Instansi apa saja yang melakukan sosialisasi?